

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT
KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN
DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016)**

Oleh :

Yevi Alvini

Pembimbing : Yesi Mutia Basri dan Mudrika Alamsyah Hasan

Faculty of Economic and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : yevialvini@yahoo.com

*The Influence of The Size of Local Government, The Level of Regional Wealth,
The Level of Regional Dependence on The Central Government and Capital
Expenditure on The Financial Performance of Local Governments
(A Study on Regency/City in Riau Province Period 2011-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the size of local government, the level of regional wealth, the level of regional dependence to the central government and capital expenditure on the financial performance of local governments of Regency/City in Riau Province period 2011-2016. The population used in this study is the government of Regency/City in Riau Province, amounting to 12 Regency/City. The sampling technique in this research using purposive sampling method and based on predetermined criteria obtained the sample as much 11 Regency/City. This study uses secondary data in the form of financial data from LKPD of Regency / City in Riau Province in 2011-2016 obtained from the office of BPK RI Riau Province Representative. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression analysis with t-test and coefficient determination test processed using SPSS 21. The results of this study indicate the size of local government affect the financial performance of local governments, the level of regional wealth affect the financial performance of local governments, the level of regional dependence to the central government does not affect the financial performance of local governments, capital expenditures affect the financial performance of local governments.

Keywords : Size of Local Government, Level of Regional Wealth, Level of Region Dependence to Central Government, Capital Expenditure, Financial Performance of Local Government.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan

roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan

bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar terciptanya pemerintahan yang bersih. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada 1 Januari 2002 ini pun menyebabkan beralihnya berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang semulanya berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 menegaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan atau penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Sebagai implikasinya, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran atas kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah daerah.

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hamzah, 2007). Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya.

Selain membandingkan, pengukuran kinerja juga dapat menggunakan enam rasio yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2012: 232).

Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara berurutan yaitu sebesar 79%, 75%, 80% dan 79%, dimana persentase tersebut jika dikategorikan dalam kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah menurut Kepmendagri tahun 1996, kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2011-2014 tersebut sudah efisien, karena presentase kinerja keuangan yang didapat berada dalam rentang nilai 60%-80% (cukup efisien), namun berbeda dengan hasil persentase kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

tahun 2015-2016 yang masing-masing persentase nilainya adalah 93% dan 97%, jika dikategorikan dalam kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah menurut Kepmendagri tahun 1996, kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2015-2016 tersebut kurang efisien, karena presentase kinerja keuangan yang didapat berada dalam rentang nilai 90%-100% (kurang efisien).

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan di Indonesia, dan berbagai faktor dalam penelitianpun terbukti berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Diantaranya penelitian oleh Aziz (2016) dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan belanja daerah pada pemerintah daerah Jawa Timur, Wiguna (2015) dengan menggunakan variabel PAD, DAU dan belanja modal pada pemerintah daerah Sumatera Selatan, Nanda (2017) dengan menggunakan variabel tingkat kekayaan, belanja daerah, ukuran daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, ukuran legislatif dan temuan audit BPK pada pemerintah daerah di pulau Sumatera, Suryaningsih (2016) dengan menggunakan variabel kemakmuran, status daerah, dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat pada pemerintah daerah Bali, Sudarsana (2013) dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal, temuan audit BPK dan tingkat kekayaan pada pemerintah daerah se-Indonesia, Ara (2016) dengan menggunakan

variabel tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal dan temuan audit BPK pada pemda pulau Sumba, Astiti (2016) dengan menggunakan variabel belanja rutin dan belanja modal pada pemda Bali, Achmad (2017) dengan menggunakan variabel ukuran daerah, *intergovernmental revenue* dan hasil audit BPK pada pemda Lampung.

Dari penelitian-penelitian tersebut Aziz (2016) dan Achmad (2017) menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, sedangkan menurut Nanda (2017) dan Sudarsana (2013) ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Nanda (2017), Sudarsana (2013) dan Ara (2016) menyatakan bahwa tingkat kekayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Berbeda dengan pendapat Suryaningsih (2016) dan Wiguna (2015) bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Wiguna (2015), Suryaningsih (2016) dan Ara (2016) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diprosikan DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Sedangkan menurut Nanda (2017) dan Sudarsana (2013) tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diprosikan DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Selanjutnya Ara (2016) dan Astiti (2016) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Berbeda dengan pendapat Suryaningsih (2016), Wiguna (2015) dan Sudarsana (2013) bahwa belanja

modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).

Ukuran yang besar dalam pemerintah yang diprosikan dengan total aset akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Ayuningsih (2016) yang menyatakan *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah adalah aset yang kurang produktif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Juliawati, *et al*, (2012) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan

mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010).

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, *et al*, 2012). Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka Pemda akan memiliki kinerja keuangan yang baik serta melakukan pelayanan yang baik pula terhadap masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian Kusuma (2017)

bahwa kekayaan yang diprosikan dengan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun bertentangan dengan hasil penelitian oleh Armaja (2015) yang memperoleh hubungan negatif kekayaan daerah dengan kinerja keuangan. Hal ini bermakna bahwa penerimaan kekayaan daerah oleh Pemda tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja. Pengaruh negatif PAD terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemda, maka akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan kekayaan yang besar, sehingga berdampak buruk atau penurunan penilaian pada kinerja keuangan.

Tingginya ketergantungan pada DAU menandakan pemerintah daerah belum optimal dalam menciptakan kebijakan atau program/kegiatan guna memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di wilayahnya untuk kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah pula kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Damayanti (2011) bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan maupun penurunan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diprosikan dengan total DAU dibandingkan

dengan total pendapatan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan yang tidak berpengaruh dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut berakibat pada Dana Alokasi Umum belum dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga bisa dinilai dari sisi belanja pemerintah daerah yang besarnya beragam, hal tersebut disesuaikan dengan besar pendapatan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu komponen dalam belanja daerah adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemda akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian oleh Andirfa

(2016) dan Mulyani (2017) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemda, artinya komponen belanja modal ternyata tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda menjadi lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah banyaknya korupsi yang dilakukan. Ternyata dengan bertambahnya dana untuk meningkatkan pembangunan daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut yang dapat merugikan pemerintah dan menurunkannya kinerja keuangan pemerintah di mata masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau?
3. Apakah tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau?

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
4. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan belanja modal terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Hamzah, 2007). Menurut Halim (2012: 232), “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Ukuran Pemerintah Daerah

Kusumawardani (2012) menjelaskan bahwa ukuran (size) adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran

organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).

Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat

Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut (Nordiawan dan Ayuningtyas, 2010:26) DAU adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Belanja Modal

Menurut (Halim dan Muhammad, 2011:107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki. Menurut Sumarjo (2010) pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat tercapai. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda

tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah menandakan daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Saraswati (2014) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD maka kebutuhan daerah akan terpenuhi dan kualitas pelayanan publik meningkat. Dimana peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah.

H₂: Tingkat Kekayaan Daerah Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat akan menyebabkan pemerintah daerah enggan mengoptimalkan penggalan potensi PAD yang dimilikinya. Pemerintah daerah beranggapan dengan bantuan pendapatan dari pemerintah pusat tersebut sudah cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga pemerintah daerah tidak perlu meningkatkan kinerjanya lagi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerahnya. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah pula kinerja pemerintah daerah. Didukung hasil penelitian sebelumnya oleh Gideon (2013) dan Damayanti (2011) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah pada pusat dengan proksi DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: Tingkat Ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat Berpengaruh terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Belanja modal sangat erat kaitanya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin besar belanja

modal maka akan semakin banyak pula pembangunan infrastruktur dan sarana di daerah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang artinya kinerja daerah tersebut akan lebih baik. Hasil penelitian oleh Mulyani (2017) dan Andirfa (2016) juga menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini adalah:
H₄: Belanja Modal Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu yang berjumlah 12 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi berdasarkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114), dengan mengumpulkan data-data keuangan yang berasal dari LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2011-2016.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan

diinterpretasikan (Suyonto, 2013:35).

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) (Ghozali, 2013: 160).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai VIF (*Varian InfalactionFactor*) dan nilai *tolerance* (Ghozali, 2013: 105).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji *Scatterplot* (Ghozali, 2013: 139).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi *Durbin Watson Test* (*DW-Test*) (Ghozali, 2013:110).

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda untuk hipotesis pertama,

hipotesis kedua, hipotesis ketiga, hipotesis keempat dan hipotesis kelima dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α : Koefisien Konstanta

β : Koefisien Regresi

X₁: Ukuran Pemerintah Daerah

X₂: Tingkat Kekayaan Daerah

X₃: Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat

X₄: Belanja Modal

E : Error

Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji parsial (uji t). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5% (Ghozali, 2013).

Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
UPD	66	27,14	30,11	29,0340	,50026
TKD	66	,02	,24	,0820	,05284
TKDKPP	66	,02	,50	,3311	,11447
BM	66	,14	,49	,2455	,07527
KK	66	,64	1,00	,8411	,10718
Valid N (listwise)	66				

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	Keterangan
N	66	
Kolmogorov-Smirnov Z	,704	Data Terdistribusi Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	,705	

Test distribution is Normal
Calculated from Data

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel 2 menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,704 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,705. Karena hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan signifikansi diatas 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

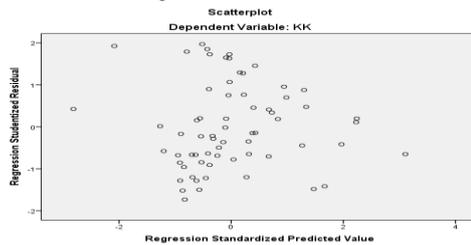
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
UPD	,854	1,171
TKD	,923	1,084
TKDKPP	,990	1,010
BM	,827	1,210

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF variabel tersebut yang menunjukkan angka dibawah 10. maka hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas antar variabel.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun dibawa angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Deskriptif	Durbin-Watson	Keterangan
n=66, α=0,05	1,101	Tidak Terjadi Autokorelasi

a. Predictors: (Constant), BM, TKD, TKDKPP, UPD

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4 diatas diketahui bahwa nilai d_{hitung} (*Durbin Watson*) terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1,101 < 2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,898	0,677		1,327	0,009
UPD	0,054	0,024	0,251	2,264	0,027
TKD	0,611	0,217	0,301	2,822	0,006
TKDKPP	0,118	0,097	0,126	1,219	0,227
BM	0,356	0,161	0,25	2,214	0,031

a. Dependent Variable: KK

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan analisis regresi linear berganda untuk hipotesis pertama sampai hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,898 + 0,054 \text{ UPD} + 0,611 \text{ TKD} + 0,118 \text{ TKDKPP} + 0,356 \text{ BM}$$

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi Regresi Linear Berganda
Model Summary^b

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,599 ^a	0,359	0,317	0,08861

a. Predictors: (Constant), BM, TKD, TKDKPP, UPD

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel 6 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,317. Angka ini menjelaskan bahwa 31,7% kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal, sedangkan sisanya 68,3% kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel lain seperti ukuran legislatif, *leverage*,

pendapatan pajak daerah dan variabel lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki $t_{hitung} = 2,264 >$ nilai $t_{tabel} = 2,000$ dan nilai signifikansi $0,027 < 0,05$ yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kusumawardani (2012), Aziz (2016) dan Achmad (2017) yang membuktikan bahwa total aset sebagai ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel tingkat kekayaan daerah memiliki $t_{hitung} = 2,822 >$ nilai $t_{tabel} = 2,000$ dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ yang berarti bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Julitawati (2012), Wenny (2012), dan Ara (2016) yang menemukan bahwa kekayaan Pemda yang diproksikan

dengan PAD tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menjelaskan bahwa variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat memiliki $t_{hitung} = 1,219 <$ nilai $t_{tabel} = 2,000$ dan nilai signifikansi $0,227 > 0,05$ yang berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dan tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2011) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta penelitian oleh Wiguna (2015), Suryaningsih (2016) dan Ara (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

Hasil penelitian ini justru sejalan dengan penelitian Saraswati (2014), Nanda (2017), Sudarsana (2013) dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki $t_{hitung} = 3,930 >$ nilai $t_{tabel} = 1,993$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel belanja modal memiliki $t_{hitung} = 2,000 >$ nilai $t_{tabel} = 2,000$ dan nilai signifikansi $0,031 > 0,05$ yang berarti bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Andirfa (2016), Mulyani (2017), Ara (2016) dan Astiti (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil pengujian menunjukkan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Sedangkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Keterbatasan Penelitian

1. Sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau selama periode 2011-2016.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 faktor dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal, sedangkan masih banyak faktor lain yang tidak dipertimbangkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Bagi peneliti berikutnya agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian serta menambah periode pengamatan agar diperoleh hasil yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan dan menambah variabel lainnya yang akan digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diperoleh hasil yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSATKA

Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. (2006). *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber*

- Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. vol. 2, No. 2.
- Achmad. 2017. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ahmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aulia, Kusuma. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia). Surabaya.
- Ara, Samuel Christian. 2016. *Pengaruh Katakarakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba*. JAFFA, 04 (1) : 1 - 17.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Armaja. (2015). *Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Astiti. 2016. *Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14, no. 3.
- Azhar, M. (2008). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. (Tesis. Universitas Sumatera Utara).
- Aziz, Asmaul. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*. EKSIS Vol XI No 1.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama Penerbit BPFE UGM, dan Pusat Pengembangan Akuntansi. UGM.
- Bhuono Agung, Nugroho. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta : ANDI
- Curristine, T. 2007. *Government Performance : Lessons and*

- Challenges. Oecd Journal on Budgeting*. Volume 5 –No. 1.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators*. *Academy of Management Journal*, Vol. 34: 555-590.
- Darwanto, Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Pusat Bahasa. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-14)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Diyah, Ayuningsih. (2016). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS “*. Semarang : UNDIP.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Surepno. 2013. *Pengaruh Return On Equity (Roe), Ukuran (Size) dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. 2016. *Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.2, 1453-1481.
- Syafitri, Febriyani, 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.